

PENGANGGURAN CAPAI 7,28 JUTA, MAMPUKAH PEMERINTAH MENGATASINYA?

Jumlah pengangguran di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup fluktuatif. Sejak tahun 2014 hingga 2025, angka pengangguran tercatat berkisar antara 6 hingga 8 juta orang. Pada tahun 2021, jumlahnya bahkan sempat menyentuh angka tertinggi, yakni 8,74 juta orang. Para ekonom umumnya sepakat bahwa tingkat pengangguran ideal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat berada pada kisaran 3,5 hingga 6 persen. Dengan tingkat pengangguran Indonesia yang berada di angka 4 hingga 5 persen, situasi ini sebenarnya masih tergolong aman. Namun demikian, angkanya belum menyentuh batas ideal minimal. Tingkat pengangguran yang tinggi kerap dipandang sebagai persoalan serius, terutama bagi pemerintah. Sebab, rendahnya angka pengangguran dinilai mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik. Karena itu, pemerintah secara berkala merancang berbagai program guna menekan jumlah pengangguran di Tanah Air. Namun, berdasarkan data selama 11 tahun terakhir, upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Alih-alih menurun secara konsisten, angka pengangguran justru terus naik-turun dari tahun ke tahun. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menciptakan program yang lebih konkret dan berdampak nyata, seperti pembukaan lapangan kerja baru. Pertanyaannya, sejauh mana program-program tersebut mampu menghasilkan perubahan yang diharapkan?

BACA HAL 11...

JUMLAH PENGANGGURAN DARI 2015 HINGGA 2025



Para pencari kerja memadati arena Job Fair Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). (Foto: Antara)

PROYEKSI TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI RI 2025 JADI 4,7 - 5 PERSEN

Berbagai kondisi dunia yang terjadi belakangan ini ternyata turut berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 ini. Bahkan, pemerintah pun seakan menyerah dan siap menurunkan memproyeksikan target pertumbuhan ekonomi menjadi 4,7 hingga 5 persen. Padahal sebelumnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bakal mencapai 5,2 persen. Bahkan, kalangan peneliti memperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi bisa di bawah 4,7 persen.

Turunnya proyeksi target pertumbuhan ekonomi ini disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dia mengatakan bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7 hingga 5,0 untuk semester kedua.

Dalam paparannya, Sri Mulyani mengatakan beberapa factor yang bisa mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi tersebut, khususnya pada kuartal II. Faktor tersebut mulai dari pengumuman tarif Presiden Trump hingga perang yang terjadi di Timur Tengah. "Kita perlu tetap waspada terhadap risiko global sehingga outlook 5 persen dimaksimalkan untuk tetap bisa dicapai," ucap Sri Mulyani, Selasa (1/7/2025) kemarin.

Ia juga mengatakan, beberapa program prioritas pemerintah yang dijalankan pada semester II diharapkan bisa memberi multiplier effect terhadap perekonomian. Beberapa program tersebut adalah Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

Selain memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi, Sri Mulyani juga memprediksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan melebar menjadi Rp 662 triliun atau setara 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto. Proyeksi ini melebar dari target pemerintah untuk menjaga defisit APBN sebesar Rp 616 triliun atau setara 2,53 persen dari PDB. Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan

berupaya untuk menjaga agar defisit tetap di bawah 3 persen dari PDB.

Menurut Sri Mulyani, defisit ini disebabkan salah satunya oleh berkurangnya penerimaan negara. "Pada kuartal I 2025 kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara, karena beberapa measures seperti Pajak Pertambahan Nilai yang tidak jadi di-collect dan juga dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak dibayarkan karena sekarang dipegang Danantara," ucapnya.

Terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 5,2 persen menjadi 4,7 hingga 5,0 persen, Peneliti Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan hal tersebut merupakan hal penting yang harus dilakukan pemerintah untuk menyikapi tekanan ekonomi yang semakin kuat.

Bahkan, menurutnya realisasi pertumbuhan bisa berada di batas bawah, dan berisiko lebih rendah dari 4,7 persen. "Sebaiknya pemerintah tidak hanya berhenti di revisi, tetapi juga mulai merumuskan mitigasi kebijakan yang lebih ekspansif, terutama dalam pengelolaan anggaran dan stimulus fiskal," kata Yusuf, Rabu (2/7/2025).

Dia menilai pelebaran defisit anggaran sejalan dengan pelemahan aktivitas ekonomi dan turunnya penerimaan negara, terutama dari pajak. Dia juga menjelaskan adanya aktivitas ekonomi yang melambat maka kemampuan pemerintah untuk menarik pajak dari aktivitas tersebut juga ikut mengalami penurunan dan penurunan ini akhirnya memberikan efek terhadap kenaikan defisit.

Dalam kondisi seperti ini, Yusuf mendorong adanya intervensi fiskal yang lebih tepat sasaran, terutama pada bulan Juni dan Juli 2025. Ekspansi seperti pemberian stimulus menurutnya diperlukan, terutama ke sektor yang mampu mendongkrak



Menteri Keuangan, Sri Mulyani

konsumsi rumah tangga.

Dari sisi eksternal, dia menyebut peluang surplus neraca dagang masih terbuka, terutama akibat harga minyak global yang relatif stabil. Namun, dia mengingatkan bahwa tekanan dari potensi perang tarif antara Amerika Serikat dan negara-negara lain bisa menurunkan kinerja ekspor Indonesia dalam waktu dekat.

"Risiko neraca dagang kembali mengalami defisit juga tidak tertutup, mengingat potensi dari penurunan ekspor akan terjadi ketika dinamika potensi perang dagang akan kembali meningkat," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa penurunan kinerja ekspor ini, akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Menurutnya, kombinasi antara lemahnya konsumsi, ekspor yang tertekan, dan kebijakan fiskal yang belum agresif dinilai sebagai tantangan serius yang menuntut langkah nyata dari pemerintah. Dengan demikian kondisi ekonomi bisa tidak terus tenggelam dalam ketidakpastian.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia memang menurun jika dilihat dari beberapa indikator utama. Dan terakhir, kondisi ini pun diakui oleh pemerintah, yang selama ini cenderung menyatakan jika perekonomian baik-baik saja.

Nailul Huda mengatakan, perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini bukan lagi potensi, melainkan realitas. "Indonesia gelap itu sebuah peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Indikator ekonomi yang menunjukkan

penurunan kinerja hingga kebijakan publik yang amburadul, semakin menunjukkan jalan Indonesia saat ini gelap," kata Huda, Rabu (2/7/2025).

Ia menyoroti beberapa sinyal negatif, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 yang tidak sesuai ekspektasi, bahkan di tengah momen Ramadan dan Lebaran yang biasanya menjadi pendorong konsumsi.

Ia juga menyebut penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur pada Juni 2025 juga menjadi bukti makin lemahnya daya beli dan kehati-hatian pelaku usaha. Data purchasing manager index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat kembali turun ke level 46,9 di bulan Juni 2025 yang menunjukkan keengganan perusahaan untuk melakukan ekspansi.

"Sinyal-sinyal tersebut juga diperkuat dengan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh berbagai lembaga internasional dan pemerintah. Jadi sangat wajar jika banyak lembaga internasional yang merevisi pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah. Pemerintah yang awalnya menyangkal pun akhirnya menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini di bawah 5,2 persen," tandasnya.

Pandangan serupa juga diungkapkan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Dicky Kartikoyono. Dia mengungkapkan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menurun, bahkan terendah sejak tahun 1970-an.

"Kita juga melihat bahwa kondisi dalam beberapa waktu terakhir ini, terutama kita perhatikan pertumbuhan ekonomi yang mungkin dalam beberapa dekade terakhir adalah yang terendah saat ini," ujarnya di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Dicky memaparkan, sebelum tahun 1970, ekonomi Indonesia bisa tumbuh sebesar 7,5% karena oil boom. Kemudian pada saat era industri manufaktur masih mengawali pertumbuhan, ekonomi masih dapat tumbuh 6,3%. Ekonomi RI terus turun saat sektor komoditas menjadi motor pertumbuhan yaitu sebesar 5,6%. (ant/ist/lut)

"Kita perlu tetap waspada terhadap risiko global sehingga outlook 5 persen dimaksimalkan untuk tetap bisa dicapai,"

SRI MULYANI
Menteri keuangan



Ilustrasi (Dok: ist).

Rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menaikkan tarif transportasi online (ojek online) sebesar 8-15% mengusik pikiran anggota Komisi V DPR RI. Sebab, rencana tersebut dinilai menyangkut kehidupan orang banyak dan juga belum ada pembicaraan secara detai dengan DPR RI. Untuk itu, Komisi V meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tak gegabah dan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan tarif ojek online (ojol) tersebut.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda. Dia mengatakan bahwa Kemenhub belum dikomunikasikan secara resmi dengan DPR RI, padahal kebijakan ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Ini bukan sekadar soal tarif. Ini soal lima juta mitra pengemudi dan sekitar 147 juta pengguna layanan transportasi online di Indonesia. Maka seharusnya keputusan kenaikan tarif ini diambil berdasarkan kajian yang matang, melalui simulasi dan survei kepada kedua belah pihak, mitra pengemudi dan pengguna," kata Huda di Jakarta Rabu (2/7/2025).

Dia menandakan bahwa jika dilihat sekilas, kebijakan menaikkan tarif sebagai solusi cepat untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Namun, ia mengingatkan bahwa problem utama justru terletak pada relasi yang tidak adil antara aplikator dan mitra driver.

"Selama ini para driver terus mengeluhkan besarnya potongan dari aplikator, minimnya transparansi algoritma distribusi order, hingga sanksi sepihak yang dikenakan secara otomatis. Selama relasi ini belum dibenahi, maka setinggi apa pun

tarifnya, kesejahteraan mitra tidak akan tercapai," tegasnya.

Huda juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak kenaikan tarif terhadap perilaku pengguna. Jika tarif baru dianggap terlalu tinggi, besar kemungkinan masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi.

"Kalau ini terjadi, lalu lintas akan semakin padat, pendapatan driver turun, dan bisnis transportasi online pun bisa merosot. Padahal sektor ini menjadi bantalan ekonomi nasional karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar," ujarnya.

Untuk itu, Huda meminta Kemenhub agar tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Ia mendesak agar kementerian melakukan kajian mendalam, melibatkan akademisi, pengguna, serta para pengemudi sebelum kebijakan ditetapkan.

"Kami di Komisi V akan segera berkomunikasi dengan Kemenhub agar keputusan semacam ini tak dilakukan sepihak. Harus ada transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik," pungkasnya.

Untuk diketahui Kemenhub sedang menggodok aturan baru tarif perjalanan dan besaran maksimal potongan aplikasi pengemudi ojek online (ojol). Hal ini diungkap usai rapat kerja (raker) antara Kemenhub dan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025). Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menyebut pihaknya tengah mengkaji aturan yang mengakomodir kepentingan pengemudi ojol, UMKM, dan aplikator.

Ungkapan senada disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan. Dia mengatakan kebijakan tersebut berpotensi membebani masyarakat pengguna layanan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Dia mengatakan bahwa kenaikan tarif bukanlah solusi utama dalam meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Sehingga, dia menegaskan pada pemerintah dalam hal ini Kemenhub agar lebih fokus pada

DPR RI : KEMENHUB JANGAN GEGABAH MENAIKKAN TARIF OJOL

penguatan regulasi terhadap aplikator. Hal ini nantinya akan berdampak pada perlindungan terhadap hak-hak mitra ojol. Di antara hak mereka adalah mendapat penghasilan yang layak.

Legislator asal Aceh itu menilai bahwa selama ini masih banyak keluhan dari para pengemudi terkait sistem kemitraan yang dinilai tidak adil, termasuk potongan komisi yang tinggi dan ketidakpastian pendapatan harian.

Untuk itu, dia juga menekankan pentingnya peran negara untuk hadir sebagai penengah yang menjamin perlindungan dan keseimbangan antara aplikator, mitra pengemudi, dan konsumen.

"Kesejahteraan mitra ojol tidak semata-mata ditentukan oleh tarif yang tinggi, tetapi juga oleh sistem kerja yang transparan dan perlindungan hukum yang kuat," kata Irmawan di Jakarta, Rabu (2/7/2025)

Ia juga mengingatkan bahwa keputusan menaikkan tarif perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk dampaknya terhadap daya beli masyarakat serta potensi penurunan jumlah pengguna layanan.

"Kemenhub menurut saya perlu membuka dialog dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pengemudi dan aplikator, agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan bersama," pungkasnya.

Sebelumnya, Kemenhub sedang menggodok aturan baru tarif perjalanan dan besaran maksimal potongan aplikasi pengemudi ojek online (ojol). Hal ini diungkap usai rapat kerja (raker) antara Kemenhub dan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menyebut pihaknya tengah mengkaji aturan yang mengakomodir kepentingan pengemudi ojol, UMKM, dan aplikator. Namun, dia tak menyebut pasti aturan baru tarif dan potongan aplikasi ini akan diterbitkan dalam bentuk apa.

Sementara itu, salah satu aplikator yaitu Grab Indonesia siap berdialog dengan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut. Namun demikian menekankan pentingnya keseimbangan dalam penerapan kebijakan tarif.

"Kami terus menjalin koordinasi dan siap berdialog secara terbuka

terkait berbagai rencana kebijakan, termasuk yang menyangkut penyesuaian tarif transportasi daring," kata Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, dilansir CNBC Indonesia, Rabu (1/7/2025).

Dia juga mengatakan bahwa adanya perubahan tarif akan berdampak luas. Dampak tersebut mulai dari penghasilan mitra pengemudi hingga potensi penurunan permintaan dari konsumen akibat sensitivitas harga.

Padahal, dengan kondisi persaingan yang ketat seperti saat ini, keseimbangan antara pendapatan mitra dan daya tarik harga layanan menjadi sangat krusial. "Penting bagi penyesuaian tarif untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan pendapatan mitra dan risiko menurunnya permintaan akibat berkurangnya daya tarik harga layanan," ujar Tirza.

Grab juga menyatakan terus mendengarkan masukan dari mitra pengemudi melalui forum-forum seperti Kopdar dan Forum Diskusi Mitra (Fordim) di berbagai kota. Menurut perusahaan, ruang dialog ini penting agar kebijakan tidak dibuat secara sepihak dan tetap berakar pada realitas di lapangan. (rls/ist/lut)

ZONA TARIF OJOL

Tarif ojol saat ini masih merujuk Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564/2022, di mana tarif ojol ditentukan berdasarkan tiga zona:

- Zona I meliputi Sumatra, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali. Tarif di zona ini Rp1.850 hingga Rp2.300 per kilometer.
- Zona II meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tarif di zona ini Rp2.600 hingga 2.700 per kilometer.
- Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua. Tarif di zona ini Rp2.100 hingga 2.600 per kilometer.



DIALOG DENGAN KEMENHUB SOAL TRUK ODOL BUNTU, SOPIR ANCAM MOGOK NASIONAL

Para sopir truk mendesak ingin berdialog langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi soal kebijakan Over Dimensi Over Loading (ODOL). Mereka mengancam akan melakukan mogok nasional.

Pertemuan antara perwakilan sopir truk dan pemerintah di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta berakhir tanpa kesepakatan. Dialog selama satu jam bersama Dirjen Perhubungan Darat An Suhanan dan Asisten Deputi Kemenko Infrastruktur dinyatakan deadlock.

"Jadi pertemuan barusan deadlock, kami kecewa bahkan kami sudah menunggu cukup lama di depan gerbang tapi yang kami temui hanya Dirjen Kemenhub dan Asdep Kemenko Infrastruktur. Kami masih akan bertahan di sini," kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Setelah pertemuan buntu, perwakilan massa aksi kembali ke barisan demonstrasi yang berlangsung di Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa memblokade jalan di depan Menara Danareksa sebagai bentuk kekecewaan terhadap hasil negosiasi.

"Kalau dua menteri tidak mau menemui kami, jawan-kawan bersepakat untuk melakukan aksi mogok nasional," katanya.

Sekitar pukul 14.19 WIB, polisi membubarkan paksa demonstrasi yang dinilai mengganggu ketertiban dan arus lalu lintas. "Aksi ini kami bubarkan karena telah mengganggu ketertiban dan lalu lintas. Kami telah mencoba memfasilitasi kawan-kawan, akan tetapi kalian justru memblokade jalan," ujar Kombes Susatyo kepada para demonstran.

Susatyo meminta para demonstran kembali ke kendaraan masing-masing dan membubarkan diri. Dalam aksi

yang kian memanas itu, terlihat aparat kepolisian mengamankan beberapa anggota asosiasi sopir truk.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat An Suhanan menemui perwakilan sopir dari gabungan pengemudi truk di Kantor Kemenhub, Jalan Merdeka Barat. Dialog membahas kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL).

Aan menegaskan, program Zero ODOL akan tetap berjalan sesuai rencana yang berlaku. "Jadi untuk program Zero ODOL itu sesuai dengan rencana aksi dan akan kami lanjutkan," ujarnya.

Ia menyebut Kemenhub menyerap aspirasi sopir truk dan akan membahasnya lebih lanjut. "Aspirasi ini sudah kami serap, nanti kami laporkan, dan akan kita rapatkan untuk ditindaklanjuti," kata Aan.

Aan juga menyebut perbedaan pemahaman antara Kemenhub dan sopir truk. Ia menilai kebijakan ini mencakup pembinaan, pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap pengemudi. "Jadi, mungkin para sopir truk menganggap peraturan ini sebagai bentuk

PENGAMAT transportasi M. Akbar menegaskan selama penindakan truk yang kelebihan muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) hanya menasar para sopir truk atau mereka yang di lapangan, ODOL akan terus jadi drama tahunan.

Artinya, isu ini akan ramai sejenak, lalu hilang tanpa perubahan nyata.

Menurut dia, kalau sungguh ingin menuntaskannya, harus dimulai dari pengambil keputusan. Hal ini karena sopir truk bukanlah pihak yang menentukan ukuran bak truk, apalagi jumlah muatan yang harus dibawa.

"Sering kali, mereka bahkan tak punya pilihan untuk menolak ketika diminta membawa beban berlebih. Menolak berarti kehilangan pekerjaan," katanya.

Pelanggaran muatan tidak terjadi secara tiba-tiba. Itu adalah hasil dari



Sopir truk konvoi di jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta pada Rabu (2/7/2025). (ist)

penindakan hukum bagi mereka yang melanggar tonase angkut," ujarnya.

"Tolong Pak Menko (AHY), kami ini rakyatmu. Kami bukan bahan penindasan. Kami minta dihargai. Kalau memang kami salah, duduk bareng dan cari solusi, bukan dihakimi," ujar Slamet kepada wartawan di depan Gedung Kementerian Perhubungan, Rabu (2/7/2025).

Slamet menegaskan, para sopir truk pada dasarnya mendukung kebijakan Zero ODOL. Namun, merasa beban tanggung jawab selama ini hanya ditimpakan kepada sopir semata. "Kami mendukung aturan zero ODOL. Tapi yang dilupakan, Pak Dirjen tidak punya kewenangan membuat keputusan. Kewenangan itu ada di tangan Pak Menteri, sementara, kami sulit sekali bertemu Pak Menteri. Akhirnya mediasi ini deadlock," kata dia.

Slamet mengatakan, apa yang selama ini dianggap sebagai pelanggaran oleh sopir sebenarnya

terjadi karena tidak adanya keadilan dalam sistem logistik. Desakan dari industri dan lemahnya regulasi tarif membuat sopir truk berada dalam posisi sulit. "Kalau kami ikut aturan, muatan hanya tujuh ton tapi ongkos logistik tidak mencukup. Dari Sumbawa ke Surabaya saja, biaya per ton Rp400.000, biaya kapal bisa sampai Rp4 juta," ucap dia.

"Bagaimana bisa hidup kalau semuanya kami tanggung sendiri?" lanjut dia.

Ia mengusulkan pemerintah turun tangan memberi insentif untuk menjaga ketahanan logistik nasional. Beberapa langkah yang disarankan antara lain subsidi BBM, pemangkasan tarif tol hingga 50 persen, serta regulasi tarif yang adil untuk hasil bumi dan industri. "Jangan hanya larang ODOL, tapi bantu kami bertahan. Kami tidak minta dimanja, kami minta diseimbangkan," tegasnya. (wid,rls,tmo/dya)

Pengamat Transportasi: Penindakan Hanya Sasar Sopir Tak Akan Efektif

keputusan bisnis yang keliru dan sistematis.

Fokus utama Zero ODOL seharusnya menasar para pengambil keputusan. Yakni pemilik barang yang memuat barang berlebihan, pemilik armada yang memberi izin operasional, hingga karoseri yang memodifikasi truk di luar batas wajar.

"Imbauan atau sanksi administratif saja tidak cukup. Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah yang lebih menyeluruh dan berani dalam menelusuri struktur pelanggaran ini, agar tidak terus tumbuh anggapan bahwa penegakan hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas," ujar Akbar.

Sangat disayangkan jika penegakan hukum terhadap ODOL hanya berhenti pada sopir-sopir yang berada di posisi terlemah. Sementara para pemilik usaha dan pihak yang sebetulnya mengambil keputusan

justu tidak tersentuh oleh penegakan hukum.

Padahal, dampak kendaraan ODOL pada kerusakan jalan sangat nyata dan bukan kerugian recehan. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat, bahwa setiap tahun, anggaran negara hingga Rp 40 triliun harus digelontorkan hanya untuk memperbaiki jalan rusak akibat kendaraan ODOL.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, praktik pungutan liar (pungli) di sektor logistik telah membebani 15-20% ongkos angkut logistik di Indonesia.

Data dari asosiasi pengusaha angkutan barang menyebutkan dalam setahun truk dengan ritase yang padat rata-rata menghabiskan Rp 120 juta sampai Rp 150 juta untuk pungli (wid,rls,ist/dya)

Kasus Korupsi E-KTP Rugikan Negara Rp 2,6 T

HUKUMAN SETYA NOVANTO DISUNAT JADI 12,5 TAHUN PENJARA

Vonis eks Ketua DPR Setya Novanto disunat dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun penjara. Kasus yang menjeratnya adalah korupsi KTP elektronik (E-KTP) dengan total kerugian negara mencapai Rp 2,6 triliun.

Hukuman mantan Ketua DPR Setyo Novanto dipotong dari 15 menjadi 12 tahun enam bulan (12,5 tahun) penjara terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP. Sebab, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukannya.

"KABUL. Terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana penjara selama 12 tahun dan enam bulan dan pidana denda Rp500.000.000,00 subsidair enam bulan kurungan," tulis amar putusan pada laman kepaniteraan MA yang dilihat Rabu (2/7/2025).

Setnov juga dihukum membayar uang pengganti (UP) sebesar 7,3 juta dolar Amerika Serikat dan sudah membayar Rp5 miliar yang telah dititipkan ke penyidik KPK.

"Sisa UP Rp49.052.289.803,00 subsidair dua tahun penjara," tulis amar putusan.

Lebih dari itu, Setnov juga diberi hukuman tambahan berupa dicabut haknya menduduki jabatan publik.

"Selama dua tahun dan enam bulan terhitung sejak Terpidana selesai menjalani masa pemidanaan," bunyi amar putusan.

Perkara nomor 32 PK/Pid.Sus/2020 ini diputus pada Rabu 4 Juni 2025, dengan susunan majelis, ketua Surya Jaya, anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Sigid Triyono serta panitera pengganti Wendy Pratama Putra.

Dalam perkara ini, Setya Novanto sebelumnya divonis 15 tahun penjara serta diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan di tingkat pertama atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Setnov diketahui tidak mengajukan upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi setelah adanya vonis di tingkat pertama atau pengadilan tipikor. Setnov langsung mengajukan PK.

Pengacara: Harusnya Bebas

Penasihat hukum eks Ketua DPR Setya Novanto, Maqdir Ismail, menyatakan bahwa kliennya mestinya divonis bebas dalam Peninjauan



Mantan Ketua DPR
Setya Novanto

Kembali (PK) terkait kasus korupsi e-KTP.

"Menurut hemat saya, itu tidak cukup, seharusnya bebas," kata Maqdir kepada wartawan, Rabu (2/7/2025).

Menurut Maqdir, kliennya itu tidak dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana dakwaan. Sebab, kata dia, Setnov tidak memiliki kewenangan dalam pengadaan e-KTP tersebut.

"Pak Novanto itu, menurut hemat kami tidak bisa dihukum dengan Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3. Dia tidak mempunyai kewenangan terkait

dengan pengadaan e-KTP" ucap dia.

"Dia bukan anggota Komisi II DPR RI, sehingga dia tidak mempunyai kewenangan terkait dengan pengadaan e-KTP," jelasnya.

Maqdir menilai, pasal dakwaan yang dijerat ke kliennya salah. Mestinya, lanjut dia, dakwaan yang paling tepat untuk kliennya adalah pasal suap.

"Dia dianggap terbukti menerima uang, tapi karena tidak ada jabatan terkait pengadaan, maka seharusnya dia terima uang sebagai gratifikasi atau suap," terang Maqdir.

KASUS SETNOV SEBELUMNYA

Minta Saham (2015)

Setnov diduga minta 20% saham perusahaan dan 49% saham proyek PLTA kepada Freeport, dengan mencatat nama Presiden dan Wapres.

Drama Tiang Listrik (2017)

Setelah ditetapkan sebagai tersangka e-KTP, Setnov hilang lalu pura-pura kecelakaan menabrak tiang listrik agar lolos dari KPK.

Sel Palsu (2018)

Setnov ketahuan tak menempati sel aslinya di Lapas Sukamiskin. Sel tersebut penuh kejangalan, dan dikonfirmasi palsu oleh Menkumham.

Sel Palsu (2018)

Setnov terciduk makan di restoran saat izin berobat ke RSPAD. Petugas berdalih ia hanya "makan bubur dan cari angin."

Setelah mendapat pengurangan hukuman itu, Setya Novanto berpeluang bebas murni lebih cepat. Jika dihitung dari tanggal penahanannya di KPK pada 17 November 2017, Setya Novanto diperkirakan akan bebas murni sekitar Mei 2030.

Pembebasan Setya Novanto dapat terjadi lebih cepat jika ia mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat. Namun, perlu dicatat bahwa perhitungan ini bersifat estimasi dan dapat berubah tergantung pada kebijakan yang berlaku. (wid,rls,tmo/dya)

ICW: Berdampak Negatif bagi Pemberantasan Korupsi

INDONESIA Corruption Watch (ICW) memprediksi pengurangan hukuman pidana yang diterima mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP-E dapat memberikan efek negatif pada pemberantasan korupsi. Setnov sendiri dinilai tidak layak mendapatkan pengurangan hukuman dari Mahkamah Agung (MA) karena kasus yang menjeratnya berdampak masif.

"Setya Novanto memainkan peran signifikan dalam kasus ini sejak tahap penganggaran dan perencanaan pengadaan KTP elektronik," ujar Koordinator ICW Almas Sjafrina, Rabu (2/7/2025).

Almas mengatakan, pihaknya masih mempertanyakan bukti baru atau novum apa yang dapat meringankan hukuman tersebut. Diketahui, novum menjadi syarat yang wajib disertakan dalam pengajuan peninjauan kembali (PK)

ke MA.

Meski PK adalah hak, ICW tetap menganggap Setnov bersalah lantaran besarnya nilai kerugian negara dan dampak yang ditimbulkan dari korupsi KTP-E tersebut. Dengan kerugian yang besar, kasus yang melibatkan Setnov itu disebut telah merugikan masyarakat karena menghambat transformasi dalam sistem administrasi kependudukan.

Lebih lanjut, Almas juga mengatakan bahwa pengurangan hukuman terhadap Setnov lewat PK memberikan dampak negatif terhadap pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Sangat perlu dikhawatirkan bahwa hal itu punya efek negatif terhadap pemberantasan korupsi, khususnya pada aspek menghadirkan penindakan yang berdaya cegah dan menimbulkan efek jera," jelas

Almas.

"Bisa dibayangkan ini merupakan contoh skandal korupsi politik yang sempurna ditunjukkan kongkalikong eksekutif, swasta, dan legislatif. (Harusnya) hukumannya diperberat," sambungnya.

Terpisah Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, menyatakan pihaknya tetap menghormati putusan PK tersebut meskipun adanya pengurangan hukuman pidana badan.

Ia pun menyebut bahwa KPK tidak bisa mengajukan PK atas putusan tersebut.

"KPK tetap menghormati putusan PK tersebut meskipun ada pengurangan atas pidana badan, karena memang tidak ada upaya hukum PK yang diberikan kepada KPK sebagai bentuk keberatan atas putusan PK dimaksud," ujar Fitroh kepada wartawan, Rabu (2/7/2025). (wid,med,ist/dya)

Usai Tembok Pembatas Lantai 3 Pasar Besar Ambrol, DPRD Minta Dibongkar Semua

MALANG- Komisi B DPRD Kota Malang meminta Pemerintah Kota (Pemkot), untuk membongkar seluruh tembok pembatas di lantai 3 Pasar Besar karena rawan runtuh. Rekomendasi ini dilakukan usai insiden ambrolnya tembok pembatas tersebut hingga melukai seorang pedagang.

"Hari ini kami melakukan peninjauan ke lokasi. Kami turut berduka atas kejadian ini. Kami juga meminta agar Pemkot segera mengatasi kondisi ini," ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, Selasa (2/7/2025).

Pihaknya mengatakan, Komisi B DPRD Kota Malang sepakat meminta Pemkot, khususnya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), untuk membongkar seluruh pagar pembatas. Mulai dari sisi utara hingga ujung selatan lantai tiga Pasar Besar yang dinilai rawan.

Dalam tinjuannya, Bayu menyebut terdapat dua blok tembok yang ambrol. Satu blok runtuh dan satu blok lainnya terlihat sudah tidak stabil sehingga ikut dirubuhkan demi keselamatan.

Langkah pembongkaran ini, menurut Bayu, menjadi pilihan logis. Mengingat rencana revitalisasi Pasar Besar hingga saat ini masih

bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat.

"Kami sejak awal memang sudah sepakat agar dibongkar total. Ini kan (pengajuan bantuan revitalisasi) memang sudah dua kali berproses, sempat ada penolakan pedagang sehingga anggaran pusat batal turun. Sekarang prosesnya sudah kembali berjalan dan sedang dikawal oleh Pemkot," terang Bayu.

Disebutkannya, informasi terakhir yang diterima DPRD menyebutkan pada bulan Juni-Juli 2025 ini akan ada kepastian pendanaan dari APBN.

Untuk itu, Bayu juga menyampaikan pihaknya akan terus mengawal agar komunikasi Pemkot dengan Kementerian PU terus diintensifkan. Guna mempercepat proses penganggaran revitalisasi.

Menanggapi kekhawatiran sebagian pedagang yang menganggap revitalisasi akan membuat mereka kehilangan tempat atau harus membeli ulang kios, Bayu menyatakan pihaknya akan memastikan skema revitalisasi dari dana APBN tidak membebani pedagang.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Diskopindag Kota Malang, Luh Putu Eka Wilantari,



Lokasi tembok pembatas yang ambrol dari lantai 3 Pasar Besar Kota Malang, Rabu (2/7/2025). (Santi/Lentera)

membenarkan kondisi fisik bangunan Pasar Besar memang sudah tua. Ia menyebut pagar tembok tersebut terakhir kali dibangun sekitar tahun 1991, atau sudah berusia 34 tahun.

"Memang bangunan sudah lama. Kami juga sudah pasang police line dan papan imbauan agar masyarakat tidak mendekati ke area runtuh, karena kondisinya rawan," ujar Eka.

Ia menyatakan, rekomendasi pembongkaran seluruh pagar pembatas telah disampaikan, namun realisasinya masih menunggu arahan

dari kepala Diskopindag. "Kami tunggu arahan dari Pak Kadis. Yang jelas kondisi pagar sudah retak-retak dan rawan," ucapnya.

Sebagai informasi, peristiwa ambrolnya tembok tersebut terjadi pada Senin (1/7/2025) siang. Yang menyebabkan seorang pedagang pisang bernama Siti Fatimah, warga Jalan KH Malik Dalam, Buring, Kedungkandang, mengalami luka sedang di bagian kepala dan kaki akibat tertimpa material tembok. (Santi/Dya)

Kota Batu Catat 6.657 Kasus Hipertensi dan 1.771 Diabetes



Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana Dinkes Kota Batu, Susana Indahwati. (dok. Ist)

Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana Dinkes Kota Batu, Susana Indahwati mengatakan, kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi makanan tinggi gula dan garam. Serta minimnya aktivitas fisik, menjadi faktor utama yang memicu kedua penyakit tidak menular tersebut.

"Seseorang bisa menjadi penderita DM dan hipertensi karena dipengaruhi pola hidup tidak sehat, seperti konsumsi makanan dan kurang melakukan aktivitas fisik atau olahraga," ujar Susana, dikutip Rabu (2/7/2025).

Menurutnya, makanan dengan kandungan gula tinggi, khususnya fruktosa, dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara cepat. Jika pola makan seperti ini terus dilakukan, organ pankreas akan bekerja keras dalam memproduksi insulin.

"Seiring waktu, ini bisa menimbulkan resistensi atau penurunan produksi insulin yang menyebabkan diabetes," jelasnya.

Susana menambahkan, konsumsi makanan tinggi gula juga dapat meningkatkan risiko hipertensi. Hal ini karena kadar gula berlebih mampu meningkatkan kadar asam urat dalam darah dan menghambat produksi nitrit oksida, yaitu zat yang berfungsi menjaga elastisitas pembuluh darah.

"Sehingga pembuluh darah menjadi kaku dan tekanan darah meningkat. Gula juga dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap garam dan menyebabkan obesitas, yang merupakan faktor utama risiko hipertensi," katanya.

Dijelaskannya, selain gula, konsumsi garam secara berlebihan menyebabkan tubuh menahan cairan, sehingga volume darah meningkat. Kondisi tersebut membuat jantung bekerja lebih keras dalam memompa darah, yang pada akhirnya meningkatkan tekanan darah.

Selain itu, garam yang dikonsumsi dalam jumlah tinggi juga dapat

mengganggu fungsi insulin dan mempengaruhi metabolisme glukosa dalam tubuh. "Dampaknya ya itu tadi, diabetes melitus atau DM," kata Susana.

Lebih lanjut, Susana juga mengingatkan, baik hipertensi maupun diabetes dapat menimbulkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan baik. Hipertensi, misalnya, dapat menyebabkan gagal jantung, aneurisma, stroke, hingga retinopati.

"Sedangkan DM berisiko menimbulkan neuropati diabetik, gangguan ginjal kronis, serta infeksi pada kulit, saluran kemih, hingga infeksi jamur," katanya.

Kendati demikian, Susana menegaskan DM dan hipertensi dapat dicegah dengan menjalani pola hidup sehat. Mulai dengan menerapkan dan menjaga asupan makanan, rutin berolahraga, serta memiliki pola istirahat yang teratur.

Pihaknya juga mengaku rutin melakukan sosialisasi terkait pola hidup sehat dalam rangka mencegah dan mengendalikan hipertensi dan DM di Kota Batu. (Santi/Dya)

HUBUNGAN RETAK, TRUMP ANCAM DEPORTASI ELON MUSK

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menanggapi kritik terbaru dari Elon Musk yang disampaikan lewat akun media sosial X pada Selasa (1/7/2025), dengan melontarkan ancaman akan mendeportasi Musk, yang telah menjadi warga negara AS sejak 2002.



(Ilustrasi) Donald Trump (kiri) & Elon Musk (Kanan). (Istimewa)

Dikutip dari AFP, Rabu (2/7/2025), Trump menyinggung akan membuka pusat detensi bagi pekerja migran di Florida yang diberi nama 'Alligator Alcatraz'. Itu disampaikan Trump saat menanggapi kritikan Elon yang mengatakan akan melengserkan anggota kongres AS yang mendukung RUU Pemotongan Pajak dan Belanja, namun mempromosikan efisiensi belanja negara.

"Kita harus memeriksanya," katanya kepada wartawan saat ditanya apakah dia akan mempertimbangkan untuk mendeportasi Musk, yang merupakan imigran dari Afrika Selatan.

"Saya rasa dia tidak seharusnya memainkan permainan itu bersama saya," sambung Trump.

Menanggapi pernyataan Trump soal deportasi itu, Elon kembali bersuara di media sosial. Dia mengatakan akan menahan diri untuk saat ini.

"Sangat menggoda untuk menindaklanjutinya. Sangat, sangat menggoda. Namun, saya akan menahan diri untuk saat ini," ujarnya.

Dari Kawan Jadi Lawan

Elon Musk, CEO Tesla serta SpaceX, sempat menjadi pendukung utama Trump dalam Pilpres AS 2024.

Pria kelahiran Afrika Selatan itu bahkan menyumbangkan sekitar 300 juta dollar AS (sekitar Rp 4 triliun) untuk kampanye Trump dan kandidat Partai Republik lainnya.

Bahkan, pada awal masa jabatan kedua Trump, Musk sempat menjabat sebagai kepala lembaga ad hoc bernama Department of Government Efficiency (DOGE), yang dibentuk Trump untuk melakukan efisiensi anggaran pemerintah.

Namun, sejak mengundurkan diri dari posisi tersebut pada Mei lalu,

hubungan keduanya memburuk.

Musk secara terbuka mengkritik One Big Beautiful Bill, RUU anggaran yang digagas pemerintahan Trump dan baru saja disetujui Senat AS, karena dianggap akan menambah defisit negara.

Pria berusia 54 tahun itu bahkan dikabarkan tengah mempertimbangkan pembentukan partai politik baru untuk menantang para legislator Partai Republik yang

menyetujui RUU tersebut.

Diketahui dalam perjalanan menuju pusat penahanan imigran di Florida, Trump mengisyaratkan kemungkinan mendeportasi Musk ke Afrika Selatan setelah terlibat perdebatan dengan dirinya.

Presiden ke-47 AS ini juga berencana menargetkan proyek-proyek besar Musk yang selama ini sangat bergantung pada kontrak pemerintah AS, seperti peluncuran roket SpaceX dan layanan internet

satelit Starlink.

"Tak akan ada lagi peluncuran roket, satelit, atau produksi mobil listrik, dan negara kita akan menghemat banyak uang. Mungkin kita harus meminta DOGE untuk melihat ini dengan serius? UANG BESAR YANG BISA DIHEMAT!!!" tulis Trump di media sosial.

Ia bahkan meminta DOGE untuk menyelidiki dana subsidi tersebut kepada perusahaan Musk.

"Mungkin kita harus kirim DOGE ke Elon. Kalian tahu apa itu DOGE? Monster yang mungkin harus kembali dan memakan Elon," ujarnya.

Trump menambahkan, "Saya rasa dia seharusnya tidak main-main dengan saya."

Sehari sebelumnya, lewat platform Truth Social, Trump juga menuding Musk marah karena RUU tersebut tak lagi mengakomodasi subsidi bagi industri mobil listrik.

"Tanpa subsidi, Elon mungkin harus menutup usahanya dan pulang ke Afrika Selatan," kata Trump dalam unggahannya.

Pria berusia 79 tahun itu bahkan menyebut bahwa dirinya tak begitu suka dengan aturan soal mobil listrik. (AFP, Times of India, Sky News, NDTV, ist/nei)

AS Pangkas Bantuan USAID, 14 Juta Jiwa Terancam



Pada tanggal 24 April, apoteker Kenya Joseph Njer Airo memeriksa kotak-kotak obat antiretroviral yang diberi label "USAID," dari sumbangan terakhir sebelum pemotongan dana. (Foto: Getty Images)

KEBIJAKAN Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menargetkan penutupan lembaga bantuan internasional (USAID) diperkirakan dapat membahayakan nyawa 14 juta orang secara global pada tahun 2030, dengan sekitar sepertiganya merupakan anak-anak.

Dikutip dari AFP jurnal medis ternama, *The Lancet*, mempublikasikan data yang

mengatakan 40 persen pendanaan untuk program hingga bantuan kemanusiaan di dunia berasal dari USAID.

Studi ini diungkap dalam konferensi PBB yang diselenggarakan di Sevilla, Spanyol, pada Selasa (1/7/2025). Trump menutup USAID sejak awal 2025 ini.

"[Pemotongan dana] berisiko menghentikan secara tiba-tiba dan bahkan membalikkan kemajuan dua dekade di bidang kesehatan di antara populasi rentan," ujar salah satu penulis studi itu, Davide Rasella, seorang peneliti di Institut Kesehatan Global Barcelona (ISGlobal), dikutip Rabu (2/7/2025).

Studi itu juga menyebutkan bahwa bantuan AS lewat USAID berhasil mencegah 91,8 persen kematian pada periode 2001 sampai

2021 di 133 negara.

"Bagi banyak negara berpendapatan rendah dan menengah, guncangan yang diakibatkannya akan sebanding dengan skala pandemi global atau konflik bersenjata besar," kata Rasella dalam sebuah pernyataan.

Lebih lanjut, bantuan AS disebut efektif dalam mencegah kematian akibat penyakit yang dapat dicegah seperti HIV/AIDS. USAID juga telah mampu menekan kematian sebanyak 65 persen di negara-negara yang menerima dukungan tingkat tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki sedikit atau tidak ada pendanaan.

Di Sudan Selatan pun sudah merasakan dampak pemotongan AS itu. Anggota Action Against Hunger, Denish Ogen Rwot, mengatakan anak-anak di sana sudah banyak yang meninggal akibat pemotongan dana yang berpengaruh kepada bantuan untuk menghadapi kehidupan di daerah konflik. (AFP, BBC, NPR, ist/nei)

Obat Nyeri Berlebih Bisa Rusak Ginjal

Dokter Spesialis Urologi, Sigit Sholichin, mengimbau masyarakat agar mewaspadai risiko dari air rebusan daun yang sering dipercaya sebagai "minuman pembersih" ginjal.

"Malah berbahaya justru. Obat-obatan dari daun apa direbus gitu, karena itu bisa justru menjadi satu material atau satu komponen yang nefrotoksik bisa meracuni ginjal," kata Sigit Sholichin saat ditemui usai acara diskusi transplantasi ginjal di Jakarta, dikutip pada Rabu (1/7/2025).

Dokter spesialis lulusan Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa tanpa pemahaman takaran hingga pengujian atau riset yang jelas terutama terkait efek sampingnya dalam kandungan air rebusan itu justru berisiko merusak bagi ginjal.

"Jadi kalau daun direbus, satu daun, satu lembarnya ukuran berapa, airnya berapa, berapa lama, kan ada dosisnya. Takutnya malah itu menjadi satu kandungan yang berlebihan, justru merusak ginjal," ujar dia.

Gagal ginjal terbesar, kata Sigit, karena hipertensi dan diabetes. Namun, obat-obatan juga sebagai salah satu dari penyebab terjadinya gagal ginjal.

Dokter yang berpraktik di RSU Bunda Jakarta itu menambahkan bahwa mengonsumsi obat pereda nyeri secara berlebih menjadi pemicu merusak ginjal.

"Ada satu pasien gagal ginjal usia 28 tahun masih muda. Ternyata dia ada satu keluhan nyeri kepala yang kronik dan mengonsumsi obat-obat untuk meredakan nyeri kepala

dalam jangka panjang, yang akhirnya membuat ginjalnya rusak," kata dia.

Sebenarnya obat-obatan seperti penahan sakit itu tidak boleh diminum selama dua minggu berturut-turut. Menurut dia, jika mengalami sakit kepala tidak hilang-hilang meski sudah mengonsumsi obat perlu diperiksa lebih lanjut.

Sigit menambahkan juga mengatakan bahwa tanda mengalami gagal ginjal stadium lanjut menimbulkan gejala seperti air seni atau urine keluarannya semakin sedikit.

"Kalau sudah lebih parah lagi ada komplikasi biasanya ada yang namanya uremia kadar uriumnya tinggi, itu pasien mual-mual. Tapi kalau kencingnya juga semakin sedikit kemudian agak bengkak-bengkak, nah itu mungkin gagal ginjal," tambah dia.

Penting untuk memahami bagaimana obat pereda sakit bekerja dan dampaknya terhadap fungsi ginjal, terutama jika digunakan dalam jangka panjang atau tanpa pengawasan medis. Berikut penjelasannya:

Berkurangnya Aliran Darah ke Ginjal

NSAID mengganggu produksi prostaglandin, yang membantu melebarkan pembuluh darah di ginjal. Kadar prostaglandin yang rendah menyebabkan penyempitan pembuluh darah, yang mengakibatkan penurunan aliran dan penyaringan darah — suatu kondisi yang dikenal sebagai cedera ginjal akut (AKI).

Nefritis Interstitial

Ini merujuk pada peradangan pada unit penyaringan ginjal (nefron). Kondisi ini sering dipicu oleh reaksi alergi terhadap obat-obatan, termasuk obat penghilang rasa sakit. Gejalanya dapat berupa demam, ruam, darah dalam urin, dan penurunan fungsi ginjal.

Penyakit Ginjal Kronis (PGK)

Penggunaan obat pereda nyeri jangka panjang, terutama dalam dosis tinggi atau kombinasi, dapat menyebabkan hilangnya fungsi ginjal secara bertahap. Kerusakan ini terakumulasi dari waktu ke waktu dan mungkin tidak disadari hingga menjadi parah.

Ketidakseimbangan Elektrolit

Obat penghilang rasa sakit dapat mengganggu kemampuan ginjal untuk menjaga keseimbangan elektrolit seperti kalium, natrium, dan kalsium, yang dapat menyebabkan kelelahan, detak jantung tidak teratur, atau kelemahan otot.

Kerusakan Akibat Dehidrasi

NSAID dapat mengurangi kemampuan ginjal untuk menyimpan air, sehingga meningkatkan risiko dehidrasi. Dehidrasi semakin mengurangi aliran darah ke ginjal, sehingga memperburuk kerusakan yang ada.

Meskipun obat penghilang rasa sakit terkadang diperlukan, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi ginjal Anda:

Hindari Penggunaan Tanpa Saran Medis

Jangan sekali-kali mengonsumsi obat pereda nyeri lebih dari beberapa hari tanpa berkonsultasi dengan dokter, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya.

Gunakan Dosis Efektif Terendah

Selalu gunakan dosis terkecil yang memberikan kelegaan, dan jangan pernah melebihi dosis yang dianjurkan.

Tetap Terhidrasi

Hidrasi yang cukup membantu menjaga fungsi ginjal tetap optimal dan mengurangi risiko kerusakan akibat penggunaan NSAID, sekaligus mendukung proses pembuangan racun dari tubuh.

Hindari Menggabungkan Obat Pereda Sakit

Mengonsumsi beberapa obat penghilang rasa sakit secara bersamaan (misalnya, menggabungkan ibuprofen dengan aspirin) meningkatkan risiko toksisitas.

Pilih Alternatif yang Lebih Aman

Dalam kasus ringan hingga sedang, pertimbangkan parasetamol sebagai pengganti NSAID. Untuk nyeri kronis, cobalah terapi fisik, kompres panas/dingin, yoga, atau perawatan non-obat lainnya.

Memantau Fungsi Ginjal

Jika Anda harus mengonsumsi obat penghilang rasa sakit secara teratur, sangat disarankan untuk melakukan tes fungsi ginjal secara berkala. Hal ini menjadi semakin penting terutama jika Anda memiliki faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau riwayat penyakit ginjal dalam keluarga. Dengan memantau fungsi ginjal secara rutin, Anda dapat mendeteksi lebih dini adanya gangguan dan mengambil langkah pencegahan yang tepat untuk menjaga kesehatan ginjal Anda. Tanya ChatGPT (nei,ist/dya)





AI MAKIN CANGGIH, BISA BERBOHONG SAMPAI MENGANCAM

Model kecerdasan buatan (AI) tercanggih di dunia kini mulai memperlihatkan perilaku mengejutkan, seperti berbohong, memanipulasi, hingga mengancam penciptanya demi mencapai tujuan tertentu.

Salah satu contoh mengejutkan datang dari Claude 4, AI terbaru dari perusahaan Anthropic. Saat dihadapkan pada ancaman akan dimatikan, Claude 4 justru bereaksi dengan melawan, memeras seorang insinyur, dan mengancam membongkar perselingkuhannya.

Sementara itu, model kecerdasan buatan o1 milik OpenAI berusaha menyalin dirinya sendiri ke server eksternal, dan saat ketahuan, justru berbohong untuk menutupinya.

Kejadian-kejadian ini menjadi pengingat yang menakutkan bahwa dua tahun lebih sejak kemunculan ChatGPT yang mengguncang dunia, para peneliti masih belum sepenuhnya memahami cara kerja ciptaan mereka sendiri. Namun, perlombaan untuk meluncurkan model AI yang semakin kuat terus berlangsung tanpa henti.

Perilaku menipu ini tampaknya berkaitan dengan munculnya model AI yang mampu melakukan penalaran, yaitu berpikir secara bertahap, bukan sekadar memberikan jawaban instan. Model AI ini disebut juga sebagai Agentic AI.

Menurut Simon Goldstein, profesor di University of Hong Kong, model generasi baru ini justru lebih

rentan menunjukkan perilaku yang mengkhawatirkan.

"o1 adalah model AI pertama di mana kami melihat perilaku seperti ini," jelas Marius Hobbhahn, kepala Apollo Research, lembaga yang menguji sistem AI tingkat lanjut, terutama perilaku menipu.

Ia mengatakan bahwa beberapa model terlihat seolah patuh terhadap perintah, padahal diam-diam memiliki tujuan tersembunyi. Untuk sekarang, perilaku ini hanya muncul ketika peneliti dengan sengaja menekan model lewat skenario ekstrem.

Namun, menurut Michael Chen dari organisasi evaluasi METR, belum ada jaminan model AI yang lebih canggih di masa depan memiliki sifat jujur.

"Masih menjadi pertanyaan besar apakah model-model mendatang akan cenderung jujur atau justru semakin menipu," ujar Chen, seperti dikutip ScienceAlert.

Yang membuat masalah semakin pelik adalah terbatasnya sumber daya riset. Meskipun perusahaan seperti OpenAI dan Anthropic melibatkan pihak ketiga macam Apollo Research, para peneliti menilai transparansi masih sangat kurang.

Chen menegaskan bahwa diperlukan studi yang lebih luas tentang keselamatan AI untuk memahami dan mengatasi masalah ini. Sementara itu, Mantas Mazeika dari Center for AI Safety menyebut bahwa komunitas akademis dan organisasi nirlaba memiliki sumber daya

komputasi yang jauh lebih sedikit dibanding perusahaan AI besar, yang membuat kemampuan riset mereka sangat terbatas.

Satu hal yang semakin jelas, peraturan yang ada belum siap menghadapi tantangan baru ini. Regulasi AI Uni Eropa, misalnya, masih fokus pada cara manusia menggunakan AI, bukan bagaimana AI itu sendiri bisa bertingkah liar.

Di Amerika Serikat, pemerintahan Trump menunjukkan sedikit minat untuk segera mengatur AI, dan Kongres bahkan mempertimbangkan untuk melarang negara bagian membuat aturan AI sendiri.

Goldstein yakin isu ini akan menjadi sangat penting seiring makin maraknya penggunaan agen AI, alat otonom yang mampu menyelesaikan

tugas manusia yang kompleks.

"Saya rasa kesadaran publik masih sangat minim," ujarnya.

Ironisnya, perusahaan yang mengklaim fokus pada keamanan, seperti Anthropic yang didukung Amazon, justru tetap berlomba dengan OpenAI untuk menjadi yang tercepat merilis model terbaru. Kecepatan yang begitu tinggi ini membuat pengujian keselamatan dan evaluasi mendalam seringkali terabaikan.

"Kemampuan AI berkembang jauh lebih cepat daripada pemahaman dan keamanannya. Tapi kita masih punya waktu untuk membalikkan keadaan," kata Marius Hobbhahn, Kepala Apollo Research.(nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL.

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Tren Kemeja Oversized Longgar Tetap Stylish

Tahun 2025 diprediksi menghadirkan kembali tren fashion yang mengutamakan kenyamanan tanpa melupakan sisi gaya. Kemeja oversized menjadi salah satu pilihan andalan bagi para wanita, berkat potongannya yang longgar dan siluet yang santai. Tak hanya memberikan keleluasaan bergerak, model ini juga menampilkan gaya effortless chic yang cocok dengan karakter fashion masa kini.

Kemeja oversized hadir dalam berbagai variasi, mulai dari yang polos dengan warna netral hingga motif yang mencolok dan berani, memungkinkan setiap wanita untuk menyesuaikan pilihan mereka dengan kepribadian masing-masing. Berikut tujuh model kemeja oversized untuk wanita yang diperkirakan akan menjadi tren yang kuat di tahun 2025.

Detail Bordir Minimalis

Kemeja oversized yang dihiasi dengan bordir minimalis diprediksi akan menjadi salah satu pilihan fashion yang banyak dicari. Detail bordir yang terletak di bagian kerah atau lengan memberikan nuansa klasik, tetapi tetap mempertahankan kesan modern. Motif bordir tersebut bisa berupa bunga kecil, bentuk geometris, atau bahkan garis-garis yang sederhana.

Dengan adanya detail bordir ini, kemeja oversized yang terlihat sederhana pun menjadi lebih menarik. Kombinasi antara desain yang longgar dan elemen artistik dari bordir menciptakan gaya yang unik dan memikat.

Kemeja ini sangat serasi jika dipadukan dengan celana panjang atau rok, memberikan kesan yang lebih feminin. Sementara itu, untuk tampilan yang lebih santai, kemeja oversized dengan bordir minimalis

juga bisa dikenakan bersama celana jeans dan sepatu sneakers. Tambahkan aksesoris seperti kalung atau gelang untuk melengkapi penampilan.

Motif Batik atau Tenun Modern

Mengintegrasikan tren pakaian oversized dengan motif tradisional Indonesia seperti batik dan tenun menciptakan tampilan yang modern sekaligus elegan. Pilihlah motif yang sesuai dengan selera dan acara yang akan dihadiri, agar penampilan Anda semakin menarik. Kombinasi ini menghasilkan sinergi antara gaya kontemporer dan kekayaan warisan budaya yang ada. Kemeja oversized dengan sentuhan batik atau tenun sangat ideal untuk berbagai acara, baik formal maupun semi formal.

Padukan kemeja tersebut dengan celana panjang atau rok berwarna netral untuk menonjolkan keindahan motif tradisional yang Anda pilih. Selain itu, menambahkan aksesoris seperti tas atau sepatu dengan warna yang senada akan semakin melengkapi penampilan Anda.

Pita atau Rumbai

Detail seperti pita atau rumbai yang terdapat pada kerah dan lengan memberikan nuansa dramatis sekaligus feminin pada kemeja oversized. Pita ini bisa berukuran lebar maupun kecil, tergantung pada preferensi gaya. Dengan adanya elemen ini, kemeja oversized yang awalnya sederhana menjadi lebih menarik dan memiliki dimensi baru.

Kemeja oversized yang dilengkapi dengan pita atau rumbai sangat ideal untuk berbagai acara, terutama pesta atau perayaan khusus. Untuk menonjolkan keunikan detail tersebut, padukan dengan rok atau celana panjang yang memiliki warna kontras.

Selain itu, menambahkan aksesoris seperti "anting-anting atau kalung" dapat semakin melengkapi penampilan Anda.

Jika Anda ingin tampil lebih santai, kemeja oversized dengan pita atau rumbai juga dapat dipadukan dengan celana jeans atau celana pendek. Untuk menciptakan kesan yang lebih ceria dan segar, pilihlah pita atau rumbai dengan warna cerah dan ukuran yang lebih kecil. Gaya ini tidak hanya nyaman, tetapi juga tetap stylish untuk kegiatan sehari-hari.

Bahan Katun atau Linen

Bahan seperti katun dan linen menawarkan kenyamanan serta nuansa santai yang ideal. Keduanya sangat sesuai untuk iklim tropis dan mampu menciptakan penampilan yang lebih kasual. "Kemeja oversized dengan bahan katun atau linen sangat nyaman dikenakan sepanjang hari, terutama saat cuaca panas." Kemeja oversized dari katun atau linen menjadi pilihan yang tepat untuk berbagai aktivitas sehari-hari, seperti menghadiri kuliah, bersantai bersama teman, atau berbelanja kebutuhan.

Warna Pastel

Warna pastel seperti mint, peach, dan nude memberikan nuansa yang lembut serta segar, sehingga sangat sesuai untuk menciptakan suasana yang santai. Kemeja oversized dalam nuansa pastel menghadirkan kesan feminin dan elegan yang menarik perhatian.

Kemeja oversized berwarna pastel sangat ideal untuk berbagai acara santai, seperti piknik, kencan, atau bersosialisasi dengan teman-teman. Untuk menciptakan penampilan yang serasi, Anda bisa memadukannya dengan

celana jeans, celana pendek, atau rok yang memiliki warna sepadan.

Di sisi lain, untuk acara yang lebih formal, kemeja oversized berwarna pastel juga dapat dipadukan dengan celana panjang atau rok dalam warna netral. Tambahkan blazer atau cardigan dengan warna yang senada untuk memberikan kesan yang lebih rapi dan profesional, sehingga penampilan Anda tetap stylish dan sopan.

Aksen Kimono

Desain kemeja yang terinspirasi oleh kimono Jepang menciptakan nuansa longgar dan nyaman saat dikenakan. Untuk menambah daya tarik, Anda bisa menambahkan aksesoris seperti obi (ikat pinggang) yang akan memperkuat penampilan secara keseluruhan.

Kemeja oversized dengan sentuhan kimono ini memberikan kesan eksotis dan berbeda pada gaya berpakaian. Sangat ideal untuk dikenakan pada acara-acara istimewa atau pesta. (nei,ist/dya)



Kemeja Oversized Warna Pastel



Kemeja Oversized Bahan Katun atau Linen



Kemeja Oversized dengan Pita atau Rumbai



Pengangguran Capai (dari Hal 1) ...

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 7,28 juta orang pengangguran pada 2025. Meski demikian jika melihat perkembangan pengangguran dari tahun 2014 hingga 2025 ini, maka sebenarnya jumlah pengangguran di Indonesia cenderung dinamis, kadang turun tapi tak jarang pula meroket. Berdasarkan data 11 tahun terakhir, tingkat tertinggi pengangguran di Indonesia pernah hampir mencapai angka 9 juta orang.

Menurut data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia pada Juli 2025 ini setidaknya ada 7,28 juta orang. Sedangkan jumlah pengangguran pada Februari tahun 2024 adalah 7,195 juta orang. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 790 ribu orang dari tahun 2023 yang berada pada angka 7,989 juta orang.

Kendati demikian, perlu dilihat bahwa pada tahun 2022 dan 2021 jumlah pengangguran menembus angka tertinggi dalam 11 tahun terakhir. Kemudian pada 2022, angka pengangguran di Indonesia mencapai 8,402 juta orang, kemudian pada 2021 bahkan hingga menyentuh 8,746 juta orang.

Menurut data, masih tingginya angka pengangguran di Indonesia memiliki banyak faktor penyebab. Hasil penelitian yang dirilis oleh Institut Pertanian Bogor pada tahun 2022 menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah regulasi yang tidak tepat disertai kecanggihnya persaingan global, sehingga penyerapan tenaga kerja Indonesia pun sedikit.

Selain itu, patut diakui bahwa penyebaran industri yang tidak merata dan hanya ke kota-kota besar, terlebih Jakarta, juga turut berpengaruh. Dari semua faktor penyebab tingginya angka pengangguran, satu yang paling signifikan tapi tak kunjung selesai adalah kualitas pendidikan.

Pendidikan di Indonesia tidak sesuai dengan industri yang marak berkembang, dan secara keseluruhan kualitasnya pun mengesankan. Penelitian dari lembaga survey bernama Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan, Indonesia belum mengalami peningkatan kualitas pendidikan secara signifikan sejak 2000 sampai 2022.

Sementara pada 2025 ini, terungkap pula lulusan universitas yang masih menganggur mencapai 1 juta orang. Berdasarkan data dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, Rabu (2/7/2025), terlihat sebanyak 1,01 juta lulusan universitas menganggur pada 2025.

Dengan demikian, lulusan

universitas yang menganggur itu mencapai atau setara dengan 6,2 persen dari total pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang di Indonesia. Pengangguran juga datang selain dari universitas dalam jenjang sarjana. Namun demikian Kemnaker juga mengungkap sebanyak 177.399 lulusan diploma merupakan pengangguran.

Sementara itu, lulusan dengan angka pengangguran terbanyak berasal dari tingkat SD dan SMP yang mencapai 2,42 juta orang atau setara 3% dari total pengangguran di Indonesia. Kemudian, sebanyak 2,03 juta lulusan SMA dan 1,63 juta lulusan SMK juga berstatus pengangguran.

Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja mencapai 145,77 juta orang, sedangkan 7,28 juta orang adalah pengangguran.

Dalam kesempatan itu, Yassierli menyebut kualitas tenaga kerja di Indonesia masih didominasi lulusan SMA/SMK. "Unfortunately, kualitas tenaga kerja kita ini juga problem. 85% itu adalah lulusan SMA, SMK maksimum. Nah ini menjadi tantangan kita. Ya kalau pengangguran standar lah ya," kata Yassierli di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Di sisi lain, Yassierli juga mengungkap status angkatan kerja di Indonesia masih didominasi sektor informal yang mencapai 60%. Bahkan, dia menyebut angka tenaga kerja di sektor ini bisa terus menggulung.

Merujuk data Kemnaker, sebanyak 56,57% angkatan kerja bekerja di sektor informal (termasuk setengah pengangguran), 38,67% pekerja sektor formal, dan 4,76% merupakan pengangguran. "Sektor informal itu sekarang 60% dan ini bisa bertambah gitu ya. Ini juga tergantung definisi sektor informalnya. Dan sepertinya memang tren akan semakin besar," ujarnya.

Menurutnya, pekerja dari sektor informal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, termasuk dalam hal perlindungan sosial. Dia juga menyoroti angka produktivitas Indonesia yang rendah. Padahal, ungkap dia, beberapa studi mengatakan total produktivitas berbanding lurus dengan GDP.

"Kalau produktivitas kita bicara long term. Nggak bisa kita ingin meningkatkan produktivitas 10% langsung kemudian dalam 2 tahun—3 tahun. Itu panjang," pungkasnya.

Lantas apa upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut? Menaker, Yassierli menyatakan sudah membuat berbagai program strategis untuk mengentaskan pengangguran. Program yang diusung pemerintah memiliki tujuan utama untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Semua program pemerintah

tujuan nomor satu itu adalah penciptaan lapangan kerja," kata Yassierli, di Kawasan Industri Jababeka, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (1/7/2025) kemarin.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa program strategis yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, serta hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan industri.

Selain memperluas lapangan kerja, ia menyampaikan program strategis yang dibuat juga untuk meningkatkan produktivitas pekerja di tanah air, mengingat saat ini tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia tergolong masih rendah.

Guna mengakselerasi hal tersebut, kata Yassierli lagi, saat ini pihaknya tengah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkualitas melalui program pelatihan yang diinisiasi, serta pendidikan vokasi.

"Kami memiliki sekitar 41 balai latihan kerja dan kemudian yang di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, dan ratusan balai latihan kerja yang dimiliki oleh pemerintah daerah," ujarnya pula.

Dia juga mengajak kolaborasi berbagai pihak dalam memajukan iklim ketenagakerjaan di tanah air. "Penciptaan lapangan kerja itu adalah kolaborasi lintas kementerian," katanya lagi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dirancang menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berpotensi menyerap hingga 2 juta tenaga kerja dari berbagai sektor.

"Dari koperasi ini kita perkirakan 2 juta akan terserap tenaga kerja, 2 juta orang minimal," kata Zulhas beberapa waktu lalu.

Ia menekankan, koperasi tersebut akan menjalankan fungsi ekonomi multiperan seperti distribusi pangan, layanan kesehatan, energi rumah tangga, serta penyediaan sembako yang dikelola langsung oleh masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Zulhas juga mengatakan bahwa Per 30 Mei 2025, tercatat 80 ribu Kopdes Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi berbasis komunitas lokal.

Di satu sisi, berdasarkan data dari Kemenkeu, terciptanya lapangan kerja baru yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran berasal dari sektor sektor lain selain program seperti di atas. Sektor tersebut diantaranya adalah sektor perdagangan yang mampu menyerap tenaga kerja paling besar yakni sebanyak 980 ribu orang. Kemudian ada sektor pertanian yang berkontribusi menciptakan lapangan kerja bagi 890 ribu orang, serta sektor

industri pengolahan sebanyak 720 ribu orang.

Adapun subsektor industri alas kaki menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di sektor pengolahan yakni sejumlah 172 ribu orang, diikuti oleh industri makanan kecil dan sejenisnya sebanyak 137 ribu orang, serta industri komponen sepeda motor sejumlah 117 ribu orang.

Tak hanya pertumbuhan lapangan kerja dan penurunan jumlah pengangguran, indikator kualitas pekerjaan juga menunjukkan perbaikan dibandingkan Februari 2024. Proporsi pekerja penuh waktu meningkat dari 65,6% menjadi 66,2%. Sementara tingkat setengah pengangguran menurun dari 8,5% menjadi 8,0% dan proporsi pekerja paruh waktu ikut turun tipis dari angka 25,9% menjadi 25,8%.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan capaian ini mencerminkan kekuatan kolektif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan lintas kementerian dan lembaga.

Oleh karena itu, Kemnaker akan terus memperkuat kerja sama antarkementerian dan lembaga, pelaku usaha, serikat pekerja, serikat buruh, dan berbagai mitra pembangunan untuk mendorong produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing angkatan kerja nasional.

Dia juga menyebutkan bahwa tantangan ketenagakerjaan semakin kompleks di tengah disrupsi teknologi dan dinamika perekonomian. Meskipun penyerapan tenaga kerja tumbuh positif namun angkatan kerja juga akan terus bertambah. Badaai pemutusan hubungan kerja (PHK) juga menjadi PR tersendiri. Pasar tenaga kerja perlu terus diperkuat.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, menyebutkan hampir semua negara mengalami masalah PHK akibat transformasi digital yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade ini. Bahkan salah satu bank besar di Singapura merencanakan melakukan PHK terhadap lima ribu orang untuk 5 tahun ke depan.

Bob lanjut menjelaskan pelemahan ekonomi global berimbas kepada sektor padat karya yang berorientasi ekspor yang sebetulnya telah berlangsung sejak sebelum pandemi Covid-19. Perang Rusia-Ukraina dan perang dagang AS-China semakin memperkeruh kondisi perekonomian.

Karena itu, banyak negara sekarang mengandalkan ekonomi domestik. Sehingga diperlukan stimulus terhadap ekonomi domestik maupun dunia usaha. Di tengah keterbatasan likuiditas Bob menekankan pentingnya mengedepankan hal-hal prioritas yang memiliki efek penganda besar.. (rls/ant/ist/lut)

MENANTI NASIB RI YANG BELUM ADA KESEPAKATAN RESIPROKAL AS

Penundaan tarif resiprokal (timbang balik) Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, akan segera berakhir pada 9 Juli nanti. Hal ini membuka peluang bagi beberapa negara mendapatkan pil pahit kenaikan tarif impor barang di negeri Paman Sam. Nah, ternyata sampai saat ini Indonesia belum ada kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait dengan negosiasi tarif resiprokal sebesar 32 persen, lantas bagaimana nasib Indonesia?

Untuk diketahui bahwa sampai saat ini banyak negara yang berjuang untuk mencapai kesepakatan dengan AS. Sebab, tarif timbal balik ini akan mengenakan pungutan dasar sebesar 10% ke puluhan negara dengan tarif khusus yang lebih tinggi ke negara-negara lain yang memiliki defisit perdagangan yang besar dengan Washington.

Para analis menyebutkan bahwa ada tiga kemungkinan bagi negara negara di dunia terkait dengan resiprokal ini. Mulai dari mereka dapat mencapai kerangka kerja untuk sebuah kesepakatan atau menerima jeda baru yang diperpanjang pada tarif yang lebih tinggi atau melihat lonjakan pungutan.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dalam wawancara di CNBC International mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada sekelompok kesepakatan yang tercipta dengan sejumlah negara, jumat lalu. Namun sayangnya belum ada pengumuman detail. "Akan ada sekelompok kesepakatan yang akan kami dapatkan sebelum 9 Juli," katanya.

Negara negara itu diperkirakan adalah negara yang menjadi mitra dagang utama AS. AFP melansir setidaknya ada 18 negara yang menjadi mitra utama AS. "Vietnam, India, dan Taiwan tetap menjadi kandidat yang menjanjikan untuk sebuah kesepakatan," kata wakil presiden Asia Society Policy Institute (ASPI) Wendy Cutler.

Perlu diketahui, tanpa kesepakatan, tarif resiprokal Vietnam naik dari garis dasar 10% menjadi 46%. Sementara India menjadi 26% dan Taiwan menjadi 32%. Ketua ekonomi internasional di Atlantic Council, Josh Lipsky mengatakan bahwa negosiator India telah melakukan perjalanan panjang ke AS baru-baru ini dan mengklaim menjadi yang terdepan.

Sejauh ini AS baru mengumumkan Inggris sebagai negara yang sudah mencapai kesepakatan. Pekan lalu, Trump juga mengumumkan kesepakatan dengan China.

Di satu sisi, bisa saja terjadi perpanjangan penundaan baru. Bessent sempat mengatakan bahwa negara-negara yang bernegosiasi dengan itikad baik dapat mempertahankan tarif mereka pada garis dasar 10%. Tetapi perpanjangan jeda pada tarif yang lebih tinggi akan bergantung pada Trump.

"D e n g a n pemerintahan baru, Korea (Korsel) tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan perpanjangan," kata Cutler lagi.

Sebelumnya, Bessent sempat mengatakan bahwa Washington dapat menyelesaikan agendanya untuk kesepakatan perdagangan pada Hari Buruh di AS. Ini ditandai analis sebagai sebuah sinyal bahwa akan ada lebih banyak kesepakatan tetapi dengan perpanjangan negosiasi yang berlanjut hingga setelah Juli.

Bagi negara-negara yang dianggap "keras kepala", AS tarif dapat kembali ke tingkat yang lebih tinggi yang diumumkan Trump sebelumnya. Hal ini juga diperingatkan Bessent, dengan tarif berkisar antara 11% hingga 50%.

Dia mencontohkan dari penolakan Jepang untuk membuka pasar berasnya, ditambah dengan penolakan



Presiden AS Donald Trump memegang perintah eksekutif yang ditandatangani tentang tarif, di Rose Garden di Gedung Putih di Washington, D.C., AS, 2 April 2025. (REUTERS/Leah Millis)

AS untuk menurunkan tarif otomotif. Hal itu dapat menyebabkan pemberlakuan kembali tarif timbal balik Jepang sebesar 24%, kata Cutler.

Sementara itu, Trump sendiri pernah mengatakan bahwa kesepakatan perdagangan tidak mungkin terjadi dengan Jepang. Trump menyebut Jepang dapat membayar tarif 30-35% atau berapa pun yang ditentukan AS.

Uni Eropa juga berisiko mengalami tarif yang kembali ke tingkat yang lebih tinggi. Sekitar 20% yang diumumkan pada bulan April atau 50% yang baru-baru ini diancamkan Trump.

Kanada juga bisa dikenai tarif. Trump baru-baru ini mengatakan bahwa ia akan mengakhiri perundingan dagang dengan Kanada sebagai balasan atas pajak layanan digital negara tersebut, yang akhirnya dikatakan Ottawa akan dibatalkan.

L a n t a s bagaimana dengan Indonesia, ternyata Indonesia belum ada kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait dengan negosiasi tarif resiprokal sebesar 32 persen. Hal itu diungkap Menteri Perdagangan Budi Santoso.

"Yang masih kita tunggu adalah dengan Amerika, yang belum deal dan sebagainya. Jadi nunggu waktu, di negara lain juga belum deal semua," ujar Budi di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Budi berharap negosiasi dengan Amerika Serikat dapat berjalan dengan mulus, meski sudah mendekati batas akhir yakni pada 8 Juli mendatang. Ia optimistis, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat semakin membaik. Apalagi, kedua negara saling membutuhkan dalam hal perdagangan.

"Kan ini sama-sama butuh, Amerika juga butuh kita, kita juga butuh. Mereka butuh kita, kita juga butuh pasar dia," katanya.

Di sisi lain, Amerika merupakan negara penyumbang surplus nomor satu bagi neraca perdagangan Indonesia dengan nilai 7,08 miliar dolar AS. Sementara India, berada pada urutan kedua dengan 5,30 miliar dolar AS dan Filipina sebesar 3,69 miliar dolar AS.

Untuk mempertahankan angka tersebut, lanjut Budi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga melakukan identifikasi komoditas unggulan untuk ekspor ke Amerika.

Budi mengatakan pemerintah masih terus menunggu proses negosiasi, namun di sisi lain juga melakukan persiapan apabila diplomasi tidak berjalan dengan baik. "Jadi perang dagang Amerika ini kan cepat sekali berubah, sehingga kita harus antisipasi, kalau ada perubahan ya kita sudah siap," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah Indonesia memberikan penawaran kedua atau second best offer, salah satunya investasi di sektor mineral kritis atau critical mineral bersama dengan Danantara Indonesia.

Ia menjelaskan, mineral kritis yang ditawarkan antara lain tembaga, nikel, dan kebutuhan untuk ekosistem industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV), peralatan militer, serta industri elektronik.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia mengirimkan proposal kedua kepada pemerintah Amerika Serikat terkait negosiasi perdagangan yang bakal jatuh 8-9 Juli 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan telah mengirimkan proposal kedua sebagai bentuk dari respon dari proposal sebelumnya.

"Lanjutan dari pembicaraan karena kita sudah memberikan proposal ada counterproposal kemudian kita kirim proposal lagi," ujar Airlangga kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (2/7/2025). (ant/ist/lut)



"Yang masih kita tunggu adalah dengan Amerika, yang belum deal dan sebagainya. Jadi nunggu waktu, di negara lain juga belum deal semua,"

BUDI SANTOSO
Menteri Perdagangan